



**BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 05);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 07);
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALAKA UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Malaka selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat

Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat Dearah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peraangkat Daerah yang di pimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penata Usahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah, adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD padaPerangkat Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah, adalah Dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi rencana pendaptan, rencana belanja program dan kegiatanPerangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 8

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
23. Belanja Daerah adalah Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Surat Perintah Pembayaran Langsung Uang Persediaan yang selanjutnya SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas uang persediaan.
26. Surat Perintah Pencairan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D-UP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-UP.
27. Uang Persediaan yang disingkat UP adalah Uang muka yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
28. Tambahan Uang Persediaan adalah Permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
29. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diberikan uang persediaan maksimal sebesar 20% dari pagu anggaran setelah dikurangi belanja tidak langsung, belanja modal dan dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran pengeluaran lainnya dan bukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Pengajuan pencairan uang persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPM-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPM-GU;
- (2) SPM-GU pertama diajukan dengan disertai Surat Pengesahan pertanggungjawaban Anggaran bahwa dana yang telah direalisasi melalui SPM-UP telah dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang persediaan;
- (3) SPM-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang telah disahkan.

BAB III TATA CARA PENGELUARAN KAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Tata cara pengeluaran kas dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 8

22

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 10 Januari 2018



BUPATI MALAKA, *Sf*

Sf STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 10 Januari 2018

Sf SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, *✓*

Donatus Bere
DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2018 NOMOR 01

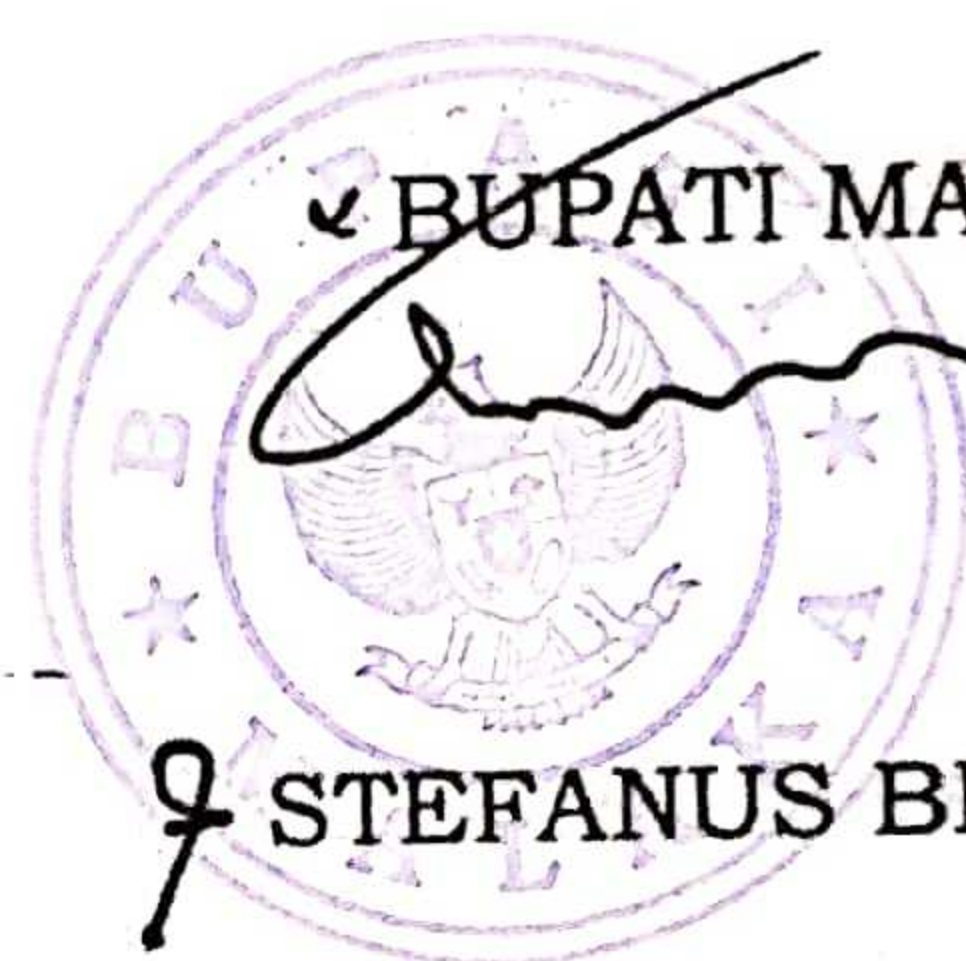
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TANGGAL 10 JANUARI 2018

**BESARAN UANG PERSEDIAAN
PADA SETIAP SKPD DALAM PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP (Rp)	KET
1	2	3	4
1	DINAS PKPO	800.000.000	
2	DINAS KESEHATAN	800.000.000	
3	RSPP	800.000.000	
4	DINAS PU	250.000.000	
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	250.000.000	
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000	
7	SEKRETARIAT DPRD	800.000.000	
8	DINAS SOSIAL	90.000.000	
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	80.000.000	
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300.000.000	
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	750.000.000	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200.000.000	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	600.000.000	
15	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	
17	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	240.000.000	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	40.000.000	
20	DINAS PARIWISATA	100.000.000	
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	800.000.000	
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180.000.000	
23	INSPEKTORAT DAERAH	250.000.000	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.000.000	
25	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000	
26	BAGIAN HUKUM	100.000.000	
27	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	400.000.000	

1	2	3	4
28	BAGIAN PEMBANGUNAN	130.000.000	
29	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	150.000.000	
30	BAGIAN UMUM	800.000.000	
31	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	100.000.000	
32	BAGIAN ORGANISASI	70.000.000	
33	KECAMATAN MALAKA TENGAH	50.000.000	
34	KECAMATAN MALAKA TIMUR	50.000.000	
35	KECAMATAN KOBALIMA	50.000.000	
36	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR	50.000.000	
37	KECAMATAN IO KUFU	50.000.000	
38	KECAMATAN BOTIN LEOBELE	50.000.000	
39	KECAMATAN LAENMANEN	50.000.000	
40	KECAMATAN SASITAMEAN	50.000.000	
41	KECAMATAN MALAKA BARAT	50.000.000	
42	KECAMATAN WELIMAN	50.000.000	
43	KECAMATAN RINHAT	50.000.000	
44	KECAMATAN WEWIKU	50.000.000	
45	SMPN1 MALTIM	10.000.000	
46	SMPN 1 KOBALIMA	10.000.000	
47	SMPN 1 MALTENG	10.000.000	
48	SMPN 2 MALTENG	10.000.000	
49	SMPN 1 MALBAR	10.000.000	
50	SMPN 2 MALBAR	10.000.000	
51	SMPN LAENMANEN	10.000.000	
52	SMPN SATAP FATUKNUTUK	10.000.000	
53	SMPN SATAP RAYMEA	10.000.000	
54	SMPN SATAP BUBUN	10.000.000	
55	SMPN SATAP BAUNAKAN	10.000.000	
56	SMPN SATAP NUNFUTU	10.000.000	
57	SMPN SATAP WEMEAN	10.000.000	
58	SMPN SATAP TUALARAN	10.000.000	
59	SMPN SATAP BIRIS	10.000.000	
60	SMPN SATAP MANUMUTI	10.000.000	
61	SMPN BAKIRUK	10.000.000	
62	SMPN METAMAUK	10.000.000	
63	SMPN WELIMAN	10.000.000	
64	SMPN SATAP RAFAU	10.000.000	
65	SMP SATAP OETFO	10.000.000	
66	SMPN AS MANULEA	10.000.000	
67	SMPN FATUKOAN	10.000.000	
68	SMPN MAKEMBALA	10.000.000	
69	SMPN LOOFOUN BONE	10.000.000	
70	SMPN BADARAI	10.000.000	

1	2	3	4
71	SMPN FAHILUKA	10.000.000	
72	SMPN WEKFAU	10.000.000	
73	SMPN HALIOAN	10.000.000	
74	SMPN HELIBAU	10.000.000	
75	SMPN KLETEK	10.000.000	
76	SMPN NITMALAK	10.000.000	
77	SMPN KOTABIRU	10.000.000	
78	SMPN WEDEROK	10.000.000	
79	SMPN KATERI	10.000.000	
80	SMPN SATAP LOROBAUNA	10.000.000	



BUPATI MALAKA, *sf*

7 STEFANUS BRIA SERAN